

BAB 2

PENGEMBANGAN KAWASAN KESR (KERJA SAMA EKONOMI SUB REGIONAL) BIMP- EAGA

2.1 Landasan Pengembangan Kawasan KESR

2.1.1 Kerjasama Ekonomi Sub Regional sebagai Antisipasi terhadap Globalisasi

Globalisasi tidak terlepas dari perkembangan 3 T yaitu transportasi, telekomunikasi dan teknologi. Dalam sisi perdagangan dunia, globalisasi bisa diartikan sebagai resultan dari perkembangan 4 hal yaitu teknologi, pasar, keuangan dan desentralisasi. Keempat faktor ini dianggap sebagai indikasi keterkaitan wilayah atau daerah dalam jaringan perdagangan ekonomi dunia atau disebut sebagai globalisasi. Secara spasial implikasi globalisasi ini mempengaruhi keseluruhan wilayah, terutama daerah perkotaan yang mengalami dampak langsung.

Implikasi globalisasi ini langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Kebijakan berorientasi ekspor dan penanaman modal asing merupakan awal pengaruh dari ekonomi eksternal terhadap perekonomian nasional. Percepatan teknologi informasi dan geopolitik telah memacu gelombang globalisasi ini dengan sangat cepat bergerak. Bentuk-bentuk globalisasi perlu diantisipasi sejak awal penerapan kesepakatan ASEAN Free Trade tahun 2003. APEC tahun 2020, dan telah membanjirnya produk luar negeri di pasar domestik. Daerah perkotaan atau kota-kota Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Batam, Makasar, Semarang, Palembang, dan Kota-kota besar lainnya harus dipersiapkan untuk terlibat dalam sistem perekonomian dunia bahkan menjadi bagian dari system kota-kota global (world cities)

Beberapa penjelasan terhadap perwujudan spasial dari gejala globalisasi di Indonesia dapat diperinci sebagai berikut :

a. *The Newest International Divisions of Labor (NIDL)*

Gejala ini menjelaskan bahwa globalisasi ekonomi di era informasi mempunyai karakteristik saling ketergantungan, tidak simetris (cenderung lebih menguntungkan satu pihak) membentuk kerjasama antar daerah (regionalisasi), diversifikasi produksi, selektif dan kekhususan. Dengan karakteristik dari NIDL, dapat diperlihatkan adanya gejala bergesernya pusat (center), antara (semi-periphery) dan pinggiran (periphery) secara berkesinambungan.

Dinamika ini lebih ditentukan perubahan upah buruh murah dengan ketrampilan rendah. Contohnya, pergeseran konsentrasi kegiatan ekonomi dunia dari Amerika Utara dan Eropa ke Asia Pasifik dan internal Asia – Pasific terjadi antara Jepang “empat harimau” Asia (Korea Hongkong, Taiwan, dan Singapura) dan Cina kemudian bergerak ke negara-negara Asia Tenggara. Antar negara-negara Asia Tenggara, telah terjadi pergeseran dari Singapura ke Malaysia dan Indonesia serta Thailand, kemudian bergeser terus ke Vietnam, Kamboja dan Laos, Gejala pergeseran inilah yang diantisipasi oleh keberadaan kerjasama ekonomi sub regional IMT-GT, IMS-GT, AIDA, atau BIMP-EAGA yang berusaha memaksimalkan nilai tambah yang dihasilkan.

b. *Restrukturisasi organisasi produksi*

Selain mencari lokasi dengan proses produksi yang kompetitif akibat ketersediaan faktor produksi yang melimpah, globalisasi telah menciptakan ketidak-pastian permintaan baik secara kuantitas maupun kualitas akibat pasar yang tidak dapat terkontrol dan terdiversifikasi secara global. Untuk itu, perusahaan-perusahaan yang sudah mengglobal cenderung melakukan restrukturisasi organisasi produk dari produksi massal menuju produksi fleksibel. “On spot information” merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui permintaan yang berkembang disuatu daerah.

Ada tiga tipe industri yang menganut restrukturisasi organisasi produksi, yaitu : **i)** industri jasa yang berteknologi lanjut dan lincah, umumnya adalah berskala kecil dan menengah seperti jasa asuransi asing, **ii)** perusahaan industri sepatu, tekstil dan

mainan anak-anak dengan jaringan luas dengan menggunakan fasilitas “*licensing-subcontract*” dari industri induk yang ada dinegara asal, dan **iii**) industri besar dengan dasar aliansi strategis sehingga menguasai pasar setempat seperti perusahaan waralaba atau hipermarket umumnya restrukturisasi ini mengambil bagian kota-kota besar (metropolitan) yang memiliki jaringan kerja yang baik untuk membentuk proses produksi dan pasar.

c. Perdagangan Internasional

Dalam skala yang lebih makro, gejala globalisasi mendorong kerjasama ekonomi lateral maupun multilateral dalam bentuk perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi dengan adanya keunggulan komparatif antara dua atau lebih negara dimana kebutuhan suatu negara dipenuhi oleh kelebihan dari negara lain.

Berbagai hambatan tariff (“*tariff barrier*”) seperti pajak ekspor/impor, kuota, dumping dll tersebut, sekelompok negara di ASEAN dan Asia Pasific membentuk suatu integrasi ekonomi yang dikenal dengan kawasan perdagangan Bebas (Free Trade Area). Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas ini diartikan bahwa pada tahun 2003 untuk ASEAN dan 2020 untuk Asia Pasific, perdagangan di antara negara-negara anggotanya sudah tidak dikenakan “*tariff* atau *no!*”, sedangkan perdagangan dengan negara di luar anggotanya dikenakan “*tariff*” tertentu yang sama. Artinya mulai tahun-tahun tersebut, komoditi dan produk dari negara anggota-anggota blok ekonomi tersebut akan keluar-masuk dengan mudah. Konsekuensinya adalah kesiapan Indonesia memproduksi komoditi unggulan yang kompetitif dengan produk negara lain. Dalam perspektif tersebut, Indonesia telah pula melakukan kerjasama ekonomi subregional dengan negara tetangga seperti Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT), Indonesia Malaysia-Thailand (IMT-GT), Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA), dan Australia-Indonesia (AIDA).

Kinerja kerjasama ekonomi sub-regional sampai saat ini bagi Indonesia relatif kurang optimal, terutama disebabkan daerah-daerah yang berada dalam lingkup kawasan tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri bahkan saling bersaing dengan kurang sehat.

Sehingga komoditi yang dihasilkan masih berupa komoditi “mentah” atau setengah jadi sehingga daerah penghasilnya hanya menerima nilai tambah yang rendah. Persepsi ini seharusnya dirubah dengan kerjasama yang “*manageable*” antar daerah terutama dengan penguatan masing-masing serta membentuk “keterkaitan yang dalam” dengan memanfaatkan secara maksimal “*outlet*” yang terdekat dengan pasar internasional. Daerah yang merupakan daerah dekat pasar berperan menjadi ujung tombak dan pusat pengembangan “*processing*” serta pusat promosi buat komoditi unggulan keseluruhan wilayah dan daerah lainnya berperan memproduksi komoditi unggulan tersebut dalam kerangka “bisnis-plan” kolektif. Semakin panjang rantai produksi akan memberikan peluang berkembangnya kegiatan ekonomi dan peningkatan penyediaan kesempatan kerja.

Bentuk spasial kerjasama kolektif antar daerah dalam menghadapi pasar international atau global merupakan tantangan terhadap RTRWN ke depan. Dalam konteks tersebut pengelolaan daerah sebagai “*outlet*” dan sebagai daerah produksi masuk dalam suatu kolektif regional hanya merupakan hasrat dari daerah (bukan pusat). Pusat memfasilitasi terbentuknya kerjasama antar daerah dan memberikan kemudahan untuk bersaing ke pasar internasional.

2.1.2 Implikasi Globalisasi Secara Spasial

Dalam kaitannya globalisasi di Indonesia dengan implikasi secara ruang maka kita bisa meninjaunya dan melihatnya berupa :

a. KESR (Kerjasama Ekonomi Sub Regional)

Segitiga pertumbuhan atau KESR bisa dikatakan sebagai implikasi global yang bisa dilihat dari kacamata spasial (keruangan). KESR di ASEAN (termasuk Indonesia) dibangun atas dasar enlightened self interest yang bertitik tolak dari pengakuan adanya kepentingan bersama, tetapi selanjutnya akan sangat bergantung kepada daya tarik wilayah atau sub wilayahnya. Dalam kerangka Indonesia ada 4 buah bentuk KESR yaitu :IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ; IMS-GT (Indonesia-

Malaysia-Singapore Growth Triangle) ;BIMP – EAGA dan AIDA (Australia – Indonesia Development Area)

2.2 Pengertian Kerja Sama Ekonomi Sub Regional (KESR)

Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah nasional secara konsisten dan berkesinambungan. Salah satu upaya tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kawasan dengan mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan memberdayakan sumberdaya manusia pada kawasan tersebut.

Timbulnya Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) sangat erat sekali kaitannya dengan berbagai kepentingan ekonomi dari masing-masing negara yang bersifat “*komplementaritas*” untuk mempercepat arus masuk investasi dengan kekuatan pendorong utamanya adalah sektor swasta dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor. Komplementaritas pada dasarnya adalah saling melengkapi apa yang kita miliki kita berikan kepada negara lain, demikian juga yang kita butuhkan kita dapatkan dari negara lain, namun demikian dalam komplementaritas juga terkandung kompetisi bebas. Dalam kaitan ini pemerintah masing-masing negara berlaku sebagai fasilitator.

Meskipun kerjasama ini dibangun atas dasar “*Enlightened Self Interest*” yang bertitik tolak dari pengakuan adanya kepentingan bersama, tetapi pada tahap selanjutnya akan sangat tergantung pada daya tarik kawasan yang dijadikan sasaran bagi investor swasta untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut.

Daya tarik kawasan ini pada dasarnya tidak semata-mata dilihat dari potensi sumber daya alam sebagai modal dasar, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor lainnya seperti sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung serta sistem perdagangan yang diberlakukan oleh masing-masing negara terkait.

Indonesia sebagai suatu negara pada era ini tidak terlepas dalam sistem perekonomian global, dimana mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang secara kuantitas jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya, tetapi kualitasnya relatif belum memadai sesuai dengan tuntutan kebutuhan, untuk itu perlu menjalin sistem perdagangan yang lebih terbuka yang akhirnya akan mendorong semua negara untuk lebih efisien melakukan aktivitas ekonominya agar produk-produknya dapat kompetitif baik dipasaran internasional maupun lokal.

Untuk menghadapi fenomena globalisasi tersebut dan upaya untuk menciptakan efisiensi dalam sistem perekonomiannya, beberapa negara telah menjalin kerjasama antar negara dengan saling memanfaatkan keuntungan komperatif masing-masing. Tujuan yang hendak dicapai secara keseluruhan dengan dibentuknya kerjasama antar negara ini adalah diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional juga untuk mempercepat upaya pemerataan di kawasan sub-regional melalui pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan investasi serta mendukung kerjasama ekonomi kawasan. Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain adalah memberikan kemudahan untuk mengadakan investasi langsung, mempertinggi nilai kompetitif (internasional) produk ekspor, menekan biaya transportasi dan transaksi, mengurangi biaya produksi dan distribusi sehingga mencapai nilai ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dukungan *sektor produksi* yang meliputi investasi, perdagangan, industri, pertanian dan perikanan, dan pariwisata serta *sektor pendukung* meliputi pengembangan SDM, mobilitas buruh, transportasi, komunikasi, dan sumber daya (energi).

Guna mempercepat pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien telah ditetapkan sejumlah kawasan yang menjadi pusat-pusat pengembangan nasional seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pusat-pusat pengembangan tersebut disebut *Kawasan Andalan*, yaitu suatu kawasan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri maupun kawasan lain yang berada disekitarnya. Sedangkan kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) adalah kawasan yang terkait

dengan pengembangan kawasan andalan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Khususnya dalam memperkuat pelaksanaan AFTA, kebijaksanaan pemerintah antara lain melaksanakan pengembangan Kerjasama Sub-regional ASEAN yang berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kawasan yang berdekatan dengan negara-negara ASEAN.

2.3 Wilayah Cakupan KESR

Dampak globalisasi telah mempengaruhi perkembangan kegiatan hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Beberapa kerjasama internasional dan regional (kawasan) telah berkembang. Adapun kerjasama sub regional tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, selain itu untuk mempercepat upaya pemerataan.

Pada tahun 1993 dibentuk kawasan sub regional Indonesia, Malaysia, Thailand Growth triangle (IMT-GT), tahun 1994 dibentuk kawasan sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asean Growth Area (BIMP-EAG), tahun 1995 dibentuk kawasan sub regional Indonesia, Malaysia Singapore Growth triangle (IMS-GT), dan tahun 1997 dibentuk kawasan pengembangan sub regional Australia, Indonesia Development Area (AIDA).

Wilayah kajian yang tercakup dalam kerjasama sub regional Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asean Growth Area (**BIMP-EAGA**), meliputi :

1. Brunei Darussalam
2. Indonesia : Pulau Kalimantan , Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua
3. Malaysia : Negara Bagian Serawak dan Sabah
4. Philippine : Propinsi Mindano dan Pulau Palawan.

2.4 Visi, Misi, Tujuan/Sasaran dan Kebijakan Pengembangan Kawasan KESR

2.4.1 Visi dan Misi

Visi pengembangan Kawasan KESR adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi wilayah yang dilaksanakan dengan kerjasama ekonomi sub regional yang dapat dipertanggungjawabkan secara social (*socially acceptable*) dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan (*environmentally sustainable*).

Adapun **Misi Pengembangan Kawasan KESR**, antara lain :

1. Menghapuskan kendala dan penyederhanaan prosedur dalam perdagangan dan investasi.
2. Mengembangkan dan menyebarkan informasi tentang kawasan
3. Membangun infrastruktur
4. Melibatkan sector swasta
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
6. Memusatkan investasi sector swasta sebagai katalisator proyek
7. Membangun dan menyiapkan kawasan khusus untuk menarik persaingan disektor swasta dan berbagai industri nerorientasi ekspor
8. Meningkatkan daya saing dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan industri barang tambang.
9. Mengembangkan dan meningkatkan industri pariwisata.
10. Mempromosikan investasi dan sector keuangan.

2.4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan KESR

Kerjasama Ekonomi Sub-Regional mencakup daerah geografis yang berdekatan, yang melintasi batas dua, tiga atau lebih negara, yang sedang menjalankan proses integrasi ekonomi dan sebagai zona investasi yang berorientasi ke luar, bergeser dari keunggulan komparatif (*comperative advantage*) menuju keunggulan kompetitif

(*competitive advantage*) sub-regional dengan tujuan menciptakan perdagangan (*trade creation*).

Tujuan yang hendak dicapai dalam Pengembangan Kawasan KESR adalah :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih cepat dan pendapatan pemerintah serta masyarakat yang lebih tinggi melalui arus masuk investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam dan manusia serta pengembangan industri bagi kepentingan ekspor melampaui batas-batas negara.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar kawasan yang berdekatan melalui kerjasama antar negara dengan saling memanfaatkan keunggulan komperatif masing-masing.
3. Mengembangkan potensi kawasan untuk meningkatkan ekonomi wilayah dan mempercepat upaya pemerataan di kawasan sub-regional melalui pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan investasi serta mendukung kerjasama ekonomi kawasan.
4. Meningkatkan pengelolaan kawasan agar dicapai pengembangan yang efisien, terpadu, serasi dan berkelanjutan.
5. Memberikan kelonggaran kendala pengadaan dan permintaan dalam negeri melalui perluasan masukan utama, faktor produksi dan perluasan akses pasar. Kerjasama ini memperluas batas-batas efektif faktor dan proses produksi, produk dan pasar di luar batas nasional dengan meraih keuntungan kesejahteraan statis (peningkatan produksi dan konsumsi) dan yang dinamis (menuju evolusi struktur ekonomi yang lebih kompetitif).

Kerjasama Ekonomi Sub-regional dapat memperluas perkembangan ekonomi ke daerah-daerah lain dan menjadi unsur utama baik dari pembangunan nasional, maupun kerjasama ekonomi lintas batas yang lebih luas. Dalam kaitan ini jelas terlihat bahwa peluang untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di kawasan-kawasan andalan dinilai sangat prospektif.

Selain itu dapat pula menjadi “*building block*” dari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi regional yang lebih luas di wilayah ASEAN seperti AFTA. Bagi Indonesia, realisasi KESR di ASEAN dapat menjadi dorongan yang kuat dalam melaksanakan AFTA. Selain itu melalui kerjasama ekonomi sub-regional diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja yang melimpah di kawasan-kawasan sekitarnya.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan kawasan KESR, sesuai dengan arahan kebijakan pengembangan yang ditetapkan, maka sasaran pengembangan yang ingin dicapai mencakup kawasan-kawasan yang memiliki kriteria :

1. Kawasan andalan yang cepat berkembang yang memiliki sektor unggulan yang dapat dijadikan penggerak utama dan berpotensi untuk meningkatkan produksi dan ekonomi nasional maupun regional.
2. Kawasan andalan yang cepat berkembang yang berpotensi dapat meningkatkan produksi jasa dan barang, penyediaan lapangan kerja, serta memperluas basis ekonomi dalam skala nasional maupun regional.
3. Kawasan andalan yang perkembangannya dapat mendorong pertumbuhan kawasan disekitarnya dengan peningkatan aksesibilitas dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.
4. Kawasan andalan yang cepat berkembang yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efisiensi investasi dan aglomerasi kegiatan sejenis untuk mendukung dan mendorong kegiatan kawasan disekitarnya.

2.4.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan KESR

Keberadaan potensi KESR dengan upaya-upaya pembangunan daerah perlu dilakukan secara sinergi sehingga keikutsertaan Indonesia dalam KESR dapat memberikan manfaat optimal terhadap perkembangan nasional secara keseluruhan maupun secara regional yaitu pada kawasan-kawasan Indonesia yang tercakup dalam wilayah KESR.

Untuk itu kebijakan pengembangan kawasan KESR harus dipadukan dengan pola pembangunan daerah sesuai arahan RTR Wilayah Nasional, yaitu melalui upaya

pengembangan kawasan andalan, Kapet dan sector-sektor unggulan didalamnya, pusat-pusat pemukiman, pintu-pintu ekspor/ impor (outlet) serta jaringan transportasi dan telekomunikasi yang menghubungkan pusat permukiman dan kawasan.

Oleh karena itu dalam rangka merumuskan kebijakan bersama antar negara dalam suatu KESR, terutama dibidang non-fiskal perlu dipadukan dengan upaya pembangunan daerah sesuai dengan pola pembangunan daerah yang ada dalam RTR Wilayah Nasional.

Adapun strategi Pengembangan Kawasan KESR adalah sebagai berikut :

1. Menghapuskan kendala dan penyederhanaan prosedur dalam perdagangan dan investasi.
2. Mengembangkan dan menyebarkan informasi tentang kawasan
3. Membangun infrastruktur
4. Melibatkan sektor swasta
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
6. Memusatkan investasi sektor swasta sebagai katalisator proyek
7. Membangun dan menyiapkan kawasan khusus untuk menarik persaingan di sektor swasta dan berbagai industri berorientasi ekspor
8. Meningkatkan daya saing dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan industri barang tambang
9. Mengembangkan dan meningkatkan industri pariwisata
10. Mempromosikan investasi dan sektor keuangan.

Pelaksanaan strategi pengembangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Harus mengacu pada penjagaan kelestarian dan pencegahan perusakan lingkungan.
- Diprioritaskan untuk proyek-proyek yang dapat dilaksanakan segera dan dalam waktu singkat.
- Diprioritaskan pada proyek-proyek yang menjanjikan dan menarik investor.

- Harus menghindari dampak negatif bagi wilayah diluar kawasan sub-regional yang dapat ditimbulkan pada pelaksanaannya.

2.4.4 Prinsip-Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan KESR

Ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ini sesuai dengan strategi pengembangan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

- **Sektor Swasta sebagai penggerak utama**
Pelaksanaan strategi pengembangan akan menghasilkan kemungkinan besar keikutsertaan sektor swasta bagi perekonomian yang dikembangkan, demikian juga melalui formulasi kebijakan dan implementasi. Peran dari sektor swasta dapat dilakukan melalui kemitraan antara sektor swasta dan sektor publik (*public-private partnership*) bagi pelaksanaan proyek dan program.
- **Konsisten terhadap kebijakan dan kelembagaan yang ada**
Adalah hal yang kritis apabila strategi pengembangan KESR mengakibatkan distorsi kebijakan atau memerlukan pembentukan institusi baru yang memerlukan biaya besar dalam pembentukannya. Pelaksanaan strategi pengembangan harus sedapat mungkin sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Juga harus konsisten dengan kewajiban nasional bagi kesepakatan-kesepakatan internasional.
- **Pelaksanakan proyek sejalan dengan prioritas nasional**
Strategi pengembangan KESR harus terfokus pada pengembangan proyek-proyek yang memiliki prioritas tinggi, yang secara geografis menguntungkan bagi percepatan operasionalisasi KESR. Dalam waktu yang bersamaan harus ada keseimbangan antara pembiayaan dan keuntungan.
- **Melakukan pendekatan pembangunan secara bertahap**
Apabila memungkinkan strategi pengembangan dilaksanakan secara pragmatis, melakukan pendekatan pentahapan bagi penyempurnaan kebijakan daripada membuat kebijakan-kebijakan baru. Strategi pengembangan KESR harus

diarahkan pada penghapusan hambatan kebijakan dan prosedur, koordinasi dan harmonisasi dalam kebijakan, standarisasi kebijakan.

- **Memberikan dampak positif terhadap pendapatan perkapita, kesetaraan gender dan lingkungan**

Strategi pengembangan KESR harus dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam kawasan sub-regional, meningkatkan keseimbangan gender, menghindari kerusakan maupun degradasi lingkungan.

- **Melakukan pendekatan dinamis daripada statis**

Strategi pengembangan KESR harus memperhatikan arah pola pertumbuhan ekonomi dalam kawasan sub-regional di masa datang. Meningkatnya pendapatan perkapita akan mengakibatkan meningkatnya pola konsumsi dan permintaan. Strategi tersebut harus memiliki elemen dinamis dalam mengakomodasi perubahan tersebut.

5.2 Uraian Tugas Tenaga Ahli Konsultan

Uraian tugas masing-masing tenaga ahli dalam Pekerjaan Penyiapan Peta Tematik Sebagai Dukungan Bagi Pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA (*Strengthening The Indonesia National Secretariat For BIMP-EAGA*), ini akan meliputi :

1. Ahli Perencanaan Wilayah Ketua Tim/Team Leader)

Ahli Perencanaan Wilayah sebagai Ketua Tim mempunyai tugas-tugas antara lain :

- Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli yang dilibatkan dalam pekerjaan ini.
- Merencanakan / Menyusun rencana pelaksanaan tugas secara keseluruhan.

- Mengkaji RTRW Pulau dan Propinsi dalam rangka menyusun pemanfaatan ruang di kawasan KESR BIMP-EAGA.
- Tinjauan terhadap kawasan sector-sektor unggulan.
- Tinjauan terhadap kawasan-kawasan potensial untuk kawasan investasi.
- Merumuskan hasil studi ini kedalam peta untuk mendukung pengembangan KESR BIMP-EAGA.
- Mempertanggung jawabkan seluruh hasil pekerjaan pada pemberi tugas.

2. Ahli Prasarana Wilayah/Teknik Sipil Transportasi

Adapun tugas-tugas Ahli Prasarana Wilayah/Teknik Sipil Transportasi meliputi :

- Melakukan survei kondisi dan jaringan transportasi di wilayah studi.
- Kajian terhadap rencana transportasi di wilayah studi dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- Kerjasama yang telah ada termasuk kebijakan di sector perhubungan (darat, laut, dan udara) yang telah sepakati dan masih dalam tahap perencanaan.
- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan kawasan kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

3. Ahli Ekonomi Pembangunan

Adapun tugas-tugas Ahli Ekonomi Pembangunan meliputi :

- Tinjauan kebijakan KESR BIMP-EAGA
- Melakukan survey kondisi ekonomi di wilayah studi.
- Mengidentifikasi potensi dan permasalahan ekonomi di wilayah studi.
- Mengkaji ekonomi global.
- Mengkaji faktor kebijaksanaan Investasi
- Mengkaji komoditas unggulan.
- Penyusunan peluang ekonomi (pohon industri komoditas unggulan).

- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan sebagai dukungan bagi pengembangan kawasan kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

4. Ahli Pemetaan/Geodesi

Adapun tugas-tugas Ahli desain Komunikasi Visual meliputi :

- Melakukan survey dan pemetaan di wilayah studi.
- Menganalisa dan memetakan struktur dan pola pemanfaatan ruang di wilayah studi.
- Menyusun dan membentuk metode-metode pemetaan menjadi suatu peta yang diharapkan mengacu kepada studi yang diinginkan.
- Membantu menyusun peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan Kawasan Kejasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

5. Ahli Disain Komunikasi Visual/Seni Komunikasi Visual

Adapun tugas-tugas Ahli Design Komunikasi Visual/Seni Komunikasi Visual meliputi :

- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan kawasan kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.
- Membuat tanyangan presentasi hasil-hasil survey baik sector-sektor unggulan, Infrastruktur dan kawasan-kawasan strategis ke dalam berbagai media komunikasi.
- Membantu dalam kegiatan presentasi di pusat dan daerah.

6. Ahli Bahasa

Adapun tugas-tugas Ahli Bahasa meliputi :

- Membantu / Menerjemahkan data-data dari sumber – sumber berbahasa asing.

- Menerjemahkan hasil studi tersebut kedalam bahasa asing.
- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

7. Ahli Perdagangan Internasional

Adapun tugas-tugas Ahli Perdagangan Internasional meliputi :

- Mengidentifikasi hubungan perdagangan antar negara kawasan KESR BIMP-EAGA.
- Mengidentifikasi peluang-peluang pasar sector unggulan dengan negara kawasan KESR BIMP-EAGA.
- Mengkaji On Going Project.
- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

8. Ahli Pariwisata

Adapun tugas-tugas Ahli Pariwisata meliputi :

- Melakukan kajian kebijaksanaan KESR – BIMP-EAGA.
- Mengidentifikasi potensi pariwisata di kawasan studi.
- Melakukan survey kondisi pariwisata di kawasan studi.
- Mengkaji On Going Project.
- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional BIMP-EAGA.

9. Ahli Ekonomi dan Politik Internasional

Adapun tugas-tugas Ahli Ekonomi dan Politik Internasional meliputi :

- Mengkaji kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan KESR BIMP-EAGA.

- Mengkaji hubungan ekonomi dan politik internasional dengan negara-negara kawasan KESR BIMP-EAGA.
- Mengkaji On Going Project.
- Membantu penyusunan peta tematik sebagai dukungan bagi pengembangan kawasan kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA.

10. Tenaga Penunjang

Tenaga Penunjang ini akan meliputi adalah tenaga-tenaga yang berpengalaman dibidang fotografi dan operator komputer.